

Nama MAJT Magelang Belum Jadi Prioritas

MAGELANG (KR) - Asisten Administrasi Umum sekaligus Ketua Takmir Masjid Agung Kabupaten Magelang, Asfuri Muhsis mengatakan, rencana penamaan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) yang saat ini baru dibangun di Kabupaten Magelang dianggap belum menjadi prioritas utama (belum penting).

Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah pembangunan MAJT di Kabupaten Magelang bisa berjalan dengan baik. "Penamaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang saat ini belum penting, yang penting sekarang ini adalah pembangunan itu (MAJT di Kabupaten Magelang) bisa berjalan dengan baik. Kalau soal nama tentu nanti kita akan koordinasi dengan Pemprov," kata Asfuri saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (7/2).

Selain itu, llyang penting saat ini adalah dipersiapkan-nya takmir atau pengurus MAJT Kabupaten Magelang yang profesional, dengan diberikan pelatihan pengelolaan masjid dengan baik, mengingat letak atau lokasi masjid berada di dekat Komplek Pemda Kabupaten Magelang, gereja, dan vihara.

Sehingga disamping berfungsi untuk beribadah, juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas dengan maksimal dan harus ramah bagi penganut agama lain dan bisa menjadi contoh utk moderasi beragama dengan baik.

Contohnya antara lain, pengembangan ekonomi umat seperti bank-bank syariah, kemudian pengembangan usaha seperti UKM, kantor bersama Ormas Islam seperti IPHI, MUI, BAZNAS dan yang lainnya untuk mempermudah dalam berkoordinasi. "Apalagi ide awal MAJT Kabupaten Magelang ini adalah Islamic Center," ungkapnya.

(Bag)-f

Pengamen Diamankan Polisi

BOYOLALI (KR) - Apes menimpa AR (25) dan MS (23), warga Desa Boto, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kakak beradik ini dituduh hendak menculik saat mengamen di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Keduanya kemudian diamankan di kantor polisi. Informasi yang dihimpun, Selasa (7/2), peristiwa apes itu menimpa AR dan MS pada Sabtu (4/2).

Ketika itu, keduanya sedang mengamen di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali sekitar pukul 11.15 WIB. Bukannya uang receh yang didapat, justru keduanya dituduh hendak menculik.

Warga pun menangkap kedua pengamen itu dan menyerahkannya ke Polsek Sawit Boyolali. Upaya warga tersebut karena belakangan marak kabar terjadinya penculikan anak di wilayah Boyolali dan daerah lainnya.

Kapolres Boyolali, AKBP Petrus Pamingotan Silalahi, membenarkan peristiwa tersebut. Dua Pengamen itu diamankan lantaran masuk pekarangan rumah warga yang tidak berpagar dan bersamaan dengan itu ada salah satu warga yang terkejut lalu spontan berteriak ketika melihat kedua pengamen tersebut.

"Mendengar teriakkan itu, kemudian warga sekitar keluar rumah, setelah itu diamankan kedua pengamen tersebut untuk dibawa ke Balai Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sawit," ujarnya.

Kapolres mengungkapkan, hasil interogasi dan klarifikasi diketahui dua orang pengamen tersebut, AR dan MS, merupakan kakak beradik. Keduanya warga Dukuh Jetis, Desa Boto, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

AR dan MS mengaku memang saat itu mereka sedang mengamen dan pada waktu itu menunjukkan alat musik berupa iciki-icik dari tutup botol dan uang hasil ngamen recehan senilai Rp 60.000 dan uang kertas senilai Rp 45.000.

(R-3)-f

Dosen UAD Yogya Jadi Ketua AST-PTMA

SEMARANG (KR) - Asosiasi Sains dan Teknologi Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah (AST-PT-MA) selama 3 hari (6-8/2) melakukan Rapat Kerja Nasional (rakernas) yang diselenggarakan di Semarang dan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) menjadi tuan rumah kegiatan ini.

Rakernas dengan pengantar Dekan FT Unimus Dr RM Bagas Wirawan serta dibuka Wakil Bendahara Majelis diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Andy Dwi Bayu Bawono SE MSI PhD Senin malam (6/2) di hotel Nindya Horizon Semarang diisi pula pelantikan pengurus baru AST-PTMA periode 2023-2026.

Para pengurus di antara nya Ketua Umum Sunardi ST MT PhD (FTI Univ Ahmad Dahlan Yogya), Sekretaris Umum Irfan Pumama ST MChem Eng (FT UM Jakarta) dan bendahara umum Hapsari Wahyuningsih ST MSc (FST Unisa Yogya). Selain itu juga dibantu sembilan bidang.

Dekan FT Unimus sebagai tuan rumah rakernas menyambut baik kehadiran para pengurus dan peserta (59 member). Unimus akan senang hati melayani para peserta yang ingin juga mengeksplere koya Semarang dan kulinernya di sela sela acara raker.

Sementara itu Sunardi didampingi Ketua Panitia Ir Luqman Assaffat STVMT MKom yang juga wakil dekan FT Unimus kepada pers menyampaikan pada kepengurusannya dirinya bersama pengurus akan mengoptimalkan penambahan anggota karena wilayah PTM/A sangat luas dari Sabang sampai Merauke.

"Bidang Sains dan Teknologi mencakup ilmu sangat luas, bisa teknik, komputer, MIPA dan lain lain. Harapannya nantinya semua merasakan memiliki, ikut andil member-sarkan untuk asosiasi ini dan tentunya juga mendapat manfaat bersama secara positif, " ujar Sunardi.

(Sgi)-f



Sunardi (kanan depan) menerima dokumen pelantikan dari Andy Dwi Bayu Bawono.



KR-Chandra AN

PAVING jalan di kawasan Kota Lama Semarang banyak yang pecah berantakan karena rusak. Tak hanya di kawasan Kota Tua, di sekitar Aloon-aloon Masjid Agung Kauman Semarang pun dalam kondisi sama. Kerusakan material jalan ini diperkirakan pada saat membangun tidak memperhitungkan kualitas paving sehingga kuat bertahan meski dilintasi kendaraan berat. Hingga Senin (6/2) kondisi jalan-jalan paving tersebut masih terlihat banyak yang pecah dan berantakan.

Ditemukan Pelanggaran Kasus Viral Buruh di Grobogan

SEMARANG (KR) - Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jateng, Mumpuniati memastikan, kasus pekerja di Grobogan yang viral di TikTok karena upahnya tidak dibayar, telah melalui mekanisme mediasi dan investigasi. Meski tidak menemui kata sepakat, perusahaan mengklaim akan membayar upah lembur pekerja.

Hal itu diungkapkan Mumpuniati kepada wartawan Selasa (7/2). Disnakertrans Jateng telah melakukan pemeriksaan kasus tersebut pada Jumat (3/2). Dari hasil investigasi awal, ditemukan pelanggaran yang dilakukan PT Sai Apparel Grobogan dalam hal pembayaran upah.

"Kami sampaikan ke pihak perusahaan dan sudah bersedia untuk

membayar upah karyawan yang belum dibayarkan dalam waktu enam hari dari hari Jumat (3/2). Kami juga memerintahkan dih-tung ulang," tutur Mumpuniati.

Menurut Mumpuniati, berdasarkan pemeriksaan perusahaan tersebut diduga tidak membayar upah lembur sejak Oktober 2022. Berdasar hal itu, Disnakertrans Jateng memerintahkan penghi-

tungan ulang nominal honor lembur sejak September. Dengan demikian akan diketahui berapa jumlah upah lembur yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan kepada para buruh yang jumlahnya mencapai sekitar 3.000 karyawan.

Mumpuniati mengatakan, sesuai Perppu 2/2022 kelalaian pembayar upah lembur dapat mengakibatkan perusahaan dikenakan sanksi pidana. Namun demikian, pemberian sanksi dilaksanakan secara berjenjang. Terkait nasib pekerja yang ada dalam video viral, Mumpuniati menegaskan mereka tidak boleh di PHK karena memperjuangkan hak mereka.

Untuk itu Mumpuniati minta kepada buruh untuk melakukan komunikasi yang baik dengan perusahaan apabila ada masalah. Jika saluran komunikasi dengan perusahaan terhambat, pekerja dapat menghubungi mediator di kabupaten/kota. Selain itu, pekerja juga bisa mengadu ke Disnakertrans Jateng. iPelapor tidak harus datang langsung ke kantor Disnakertrans Jateng. Laporan atau aduan buruh juga bisa disampaikan melalui saluran media sosial Disnakertrans Jateng. Pastikan pula cantumkan identitas lengkap, nomor telepon, itu akan kami lindungi agar bisa menin-daklanjuti laporan," tegas Mumpuniati.

(Bdi)-f

Musren BNN RI 2023 Digelar di Magelang

MAGELANG (KR) - Kepala BNN RI Dr Petrus Reinhard Golose membuka Musyawarah Perencanaan BNN RI tahun 2023 dengan tema "Akselerasi War On Drugs Menuju Indonesia "Bersinar"", di Grand Artos Hotel & Convention Magelang, Senin (6/2). Kegiatan Musren ini merupakan salah satu bentuk partisipasi BNN RI dalam upaya memulihkan kondisi perekonomian nasional pascapencabutan kebijakan PPKM oleh pemerintah karena pandemi Covid-19.

Kepada wartawan, Kepala BNN RI di antaranya mengatakan dipilihnya Magelang sebagai lokasi Musren BNN RI Tahun 2023 di antaranya mendukung pemerintah, karena sudah berakhirnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Juga mengajarkan kepada jajaran BNN RI dari seluruh Indonesia untuk lebih mengenal keberadaan Candi Borobudur, mengingat belum tentu semua pernah berkunjung ke Candi Borobudur. BNN ada di 34 provinsi dan 173 kabupaten/kota, yang semuanya hadir di Magelang.

Juga menyamakan persepsi untuk kegiatan. Core business-nya BNN bukan hanya menangkap orang, tetapi bagaimana menyelaraskan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, pemberdayaan masyarakat serta rehabilitasi dengan anggaran yang benar, dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran serta

direncanakan dengan baik.

Di forum Musren, Kepala BNN RI mengatakan kegiatan BNN RI yang melibatkan unit kerja vertikal dan berskala besar, tidak hanya dilaksanakan di Jakarta dan sekitarnya, namun juga dapat dilaksanakan di daerah-daerah dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, kegiatan musren juga memiliki makna filosofis, yaitu jajaran BNN RI dapat merefleksikan pesan nilai kehidupan dari keberadaan Candi Borobudur sebagai mahakarya leluhur Nusantara.

Kepada seluruh peserta Musren BNN RI Tahun 2023, Kepala BNN RI juga berpesan agar seluruh pimpinan Satker dapat mengakselerasikan spirit War on Drugs dan Speed Up Never Let Up melalui tindakan nyata.

Penyediaan atau pemberian layanan publik secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat di berbagai wilayah harus menjadi fokus BNN, meskipun sampai saat ini hanya memiliki unit vertikal 34 BNNP dan 173 BNN Kabupaten/Kota serta adanya ketebatasan sumber daya, baik manusia maupun anggaran.

"Namun kita tetap harus optimis. Untuk itu BNN perlu melakukan langkah-langkah breakthrough atau terobosan strategis untuk peningkatan dan pemerataan layanan publik BNN di seluruh wilayah," tambahnya.

(Tha)-f

42,5 Persen PKD di Purworejo Perempuan

PURWOREJO (KR) - Sebanyak 42,5 persen pengawas pemilu (panwaslu) kelurahan/desa (PKD) di Kabupaten Purworejo adalah perempuan. Bawaslu Kabupaten Purworejo pun berhasil memenuhi komitmen mendudukkan perempuan sebagai bagian penting dalam pengawasan pemilu di wilayahnya. Jumlah perempuan yang dilantik menjadi PKD di Kabupaten Purworejo sebanyak 209. Sementara untuk laki-laki, sebanyak 285 dilantik menjadi PKD. PKD di seluruh Purworejo tercatat 494 sesuai jumlah desa dan kelurahan.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Purworejo Anik Ratnawati mengatakan, keberadaan perempuan sebagai pengawas pemilu merata di setiap kecamatan. "Berdasarkan atas laporan yang kami terima dari panwaslu kecamatan, keterwakilan perempuan di atas 30 persen terpenuhi di hampir semua kecamatan," ungkapnya, Selasa (7/2). Menurutnya, kebijakan afirmasi perempuan sudah diterapkan sejak tahapan pendaftaran calon PKD. Regulasi mengatur adanya perpanjangan pendaftaran di suatu desa apabila tidak ada perempuan yang mendaftar sebagai calon PKD.

Pelaksanaan seleksi PKD dilakukan kelompok kerja yang dibentuk panwaslu kecamatan. Setelah penerimaan berkas selesai dan afirmasi perempuan terpenuhi, dilanjutkan dengan seleksi wawancara serta sidang pleno penetapan PKD terpilih. Hasil untuk PKD perempuan, katanya, adalah 30 di Kecamatan Ngombol, 29 Pituruh, 16 Grabag, 15 Bener, 15 Purwodadi, 14 Bayan, 13 Butuh, 12 Purworejo, 12 Banyuurip, 12 Gebang, 11 Kutoarjo, 9 Loano, 9 Kemiri, 5 Bruno, 4 Kaligesing, dan 3 di Bagelen. PKD laki-laki sebanyak 31 di Kecamatan Kemiri, 28 Butuh, 27 Ngombol, 25 Purwodadi, 20 Pituruh, 17 Kaligesing, 17 Grabag, 16 Kutoarjo, 15 Banyuurip, 14 Bagelen, 13 Purworejo, 13 Bener, 13 Gebang, 13 Bruno, 12 Loano, dan 12 Bayan.

(Jas)-f

Klaten Butuh Perda Ponpes dan Pendidikan Pancasila

KLATEN (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna, penyampaian dua rancangan peraturan daerah (Raperda), Senin (6/2). Yakni Raperda Pondok Pesantren, dan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Usai memimpin rapat, Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo mengemukakan, memberikan apresiasi pada Bupati Klaten Sri Mulyani dan jajarannya. Hal ini dikarenakan pada awal tahun, telah mengajukan dua Raperda untuk dibahas DPRD.

Menurut Hamenang, dua Raperda tersebut sangat penting, karena bicara tentang pendidikan, tidak bisa hanya ditangani pemerintah saja. Realitasnya juga ada lembaga pendidikan lain yang juga mendukung mencetak generasi muda ke depan yang gemilang. "Mayoritas di Indonesia adalah muslim, sehingga kegiatan di pondok pesantren

tumbuh luar biasa. Jika ditata dengan rapi dan diatur, bisa memaksimalkan peran dalam pendidikan," kata Ketua DPRD.

Menurut Hamenang, pendidikan pancasila sangat penting, apalagi dalam era globalisasi, teknologi informasi, kini semangat kebangsaan dan nasionalisme generasi muda mulai pudar. Dengan hadirnya Perda Pancasila nanti, diharapkan merekatkan lagi seluruh elemen masyarakat di Klaten, yang terdiri dari berbagai macam agama dan suku.

Bupati Klaten, Sri Mulyani mengemukakan, dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh berkembang di masyarakat telah berkontribusi melahirkan insan beriman yang berkarakter cinta tanah air dan berkemajuan.

Menurut Sri Mulyani keberadaan pesantren sangat penting dalam rang-

ka pembangunan masyarakat, karena pesantren besumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya. Sehubungan hal itu, sesuai aturan, Pemkab dapat memfasilitasi pondok atau asrama pesantren, masjid atau mushola pesantren,

untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan dan keamanan. Untuk itu, diperlukan adanya peraturan daerah.

Sri Mulyani mengemukakan, saat ini masih banyak pelanggaran yang dilakukan baik bersifat administrasi maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya semangat kebangsaan dan nasiona-

lisme Indonesia. Sehubungan hal itu, diperlukan regulasi yang mampu menjadi payung hukum, dan pedoman bagi Pemda Klaten berikut intansi terkait, untuk lebih menggelorakan Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Untuk itu perlu dibentuk Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(Sit)-f



KR-Sri Warsiti

Bupati Klaten menyerahkan dua Raperda kepada Ketua DPRD.